

Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak

JMSAB

429

Wastam Wahyu Hidayat*, Soehardi, Cahyadi Husadha

Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Research Paper

Financial Management

Abstract

This research aims to determine the influence of the number of Commissioners, the percentage of independent commissioners, and the compensation of the Board of Commissioners and the directors on tax management. A sample of one of the ten companies in the manufacturing sector listed on the Indonesia Stock Exchange during 2014-2018 using the Purposive sampling method. The study used multiple linear regression analysis techniques with SPSS aids (Statistical Product and Service Solutions). The results of the partial study showed that the number of Commissioners (BOARD) was positively influential in the tax management (ETR) while the percentage of independent commissioners (INDEP) and the compensation of the BOC and the Board of Directors (COMP) did not affect the tax management (ETR).

Received: 26 Feb 2021

Accepted: 18 Jun 2021

Online: 03 Sep 2021

Keywords:

Board of Commissioners, independent Commissioner, compensation, Management tax.



Corresponding Author:

Wastam Wahyu Hidayat
Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: Wastam.wahyu@dsn.Ubharajaya.ac.id

Jurnal Manajemen Strategi
dan Aplikasi Bisnis,
Vol 4, No. 2, 2021,
pp. 429 - 440

© The Author(s) 2021

DOI: <https://doi.org/10.36407/jmsab.v4i1.323>

eISSN 2655-237X



CC BY: This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional di suatu Negara yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan dukungan sepenuhnya bagi semua rakyatnya. Dalam rangka pembangunan nasional maka peran Pemerintah senantiasa mendorong pendapatan dalam negeri sebagai komponen penting untuk menjalankan berbagai program pembangunan. Oleh karenanya pemerintah mencari sumber-sumber penerimaan potensial Negara. Sumber-sumber penerimaan tersebut dapat berupa penerimaan minyak dan gas (migas) dan penerimaan bukan migas yaitu penerimaan dari sektor Pajak yang sekarang menjadi tumpuan pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir ini. Meski demikian, sampai dengan saat ini masih banyak permasalahan seputar pajak, terutama pada kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga rasio pajak tidak mengalami peningkatan signifikan meskipun berbagai kebijakan dan sistem sudah diperbaiki oleh pemerintah.

Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba dan menimalkan jumlah pajak penghasilan yang terutang. Dilain pihak pemerintah juga sedang mengupayakan untuk meningkatkan pendapatan Negara, salah satunya dari sektor pajak yang memang merupakan pendapatan Negara yang terbesar. *Corporate governance* menjadi sebuah isu yang menarik di era globalisasi seperti saat ini. Keadaan ini dikarenakan adanya maksud untuk membuat perusahaan lebih efektif dalam melaksanakan tugasnya termasuk dalam manajemen pajak perusahaan. Konsep *Corporate governance* merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi ketika suatu perusahaan telah listing di Bursa Efek Indonesia. Dengan kata lain, perusahaan harus menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin berdasarkan tata kelola yang baik sehingga dapat menempatkan dirinya sebagai motor penguat ekonomi di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. *Corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan adalah isu sentral dalam sepuluh tahun terakhir dimana dapat menjadi pertimbangan bagi *stakeholder* untuk menentukan kebijakan investasi dengan memilih perusahaan-perusahaan yang dikelola secara baik, mengacu pada berbagai standar tata kelola yang sudah ditetapkan.

Good Corporate governance menjadi masalah yang sangat penting dalam rangka bagaimana mengelola perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil untuk masa yang akan datang. Bahkan konsep *Good Corporate governance* ini mulai banyak di diskusikan di seminar-seminar di lingkungan akademis dan pengusaha, khususnya di Indonesia sejak terjadinya krisis ekonomi melanda Asia Tenggara yang juga dirasakan Indonesia. Dampak dari krisis tersebut, banyak perusahaan berjatuh karena tidak mampu mempertahankan biaya operasional perusahaan dengan beban yang makin berat. Salah satu penyebab Indonesia terkena dampak adalah karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia selama ini tidak dibangun di atas landasan yang kokoh sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sehat (Fathoni et al., 2014).

Dalam *Corporate governance* Dewan Komisaris merupakan bagian inti yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan tugas dengan baik dan membuat strategi perusahaan serta mengawasi fungsi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, juga mewajibkan terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Sedangkan Ukuran Dewan Komisaris menunjukkan berapa banyak personel yang menjadi Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan. Jadi banyaknya jumlah Dewan Komisaris akan sangat berpengaruh dalam pengawasan terhadap operasional manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pada kinerja perusahaan. Presentasi Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta tidak terikat atau bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan, (Prasasti 2011).

Pemberian kompensasi yang sesuai kepada Dewan Komisaris serta Direksi, diharapkan akan memberikan semangat dalam menjalankan perusahaan untuk mengambil strategi-strategi yang paling baik dalam pelaksanaan manajemen pajak, dengan demikian pemilik

perusahaan mengharapkan manajemen perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui efisiensi pembayaran pajak yang akan berpengaruh pada nilai perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu pemberian kompensasi yang tepat kepada Dewan Komisaris serta Direksi dapat menjadi salah satu mekanisme penerapan manajemen pajak yang tepat, (Khairunnisa dan Nasir, 2016).

Berdasarkan studi Empiris yang dilakukan oleh Ganang (2017) disebutkan bahwa jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak, artinya bahwa semakin tinggi peranan Dewan komisaris dalam mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan perpajakan maka manajemen pajak dapat dijalankan dengan efektif sesuai dengan perencanaan. Studi lainnya oleh Lestari (2016) menyimpulkan bahwa *Corporate governance*, jumlah Dewan Komisaris, presentase Komisaris Independen dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen pajak. Sedang hasil penelitian (Damanik, 2019) tidak sependapat bahwa, jumlah Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak dengan alasan kurangnya ilmu dasar dalam aktivitas bisnis perusahaan, sehingga adanya kegagalan Dewan Komisaris dalam merencanakan sistem manajemen pajak yang efektif. Semakin sedikit jumlah Dewan komisaris akan menjalankan aktivitas yang fokus sehingga manajemen pajak yang dilakukan akan berjalan semakin efektif, sedangkan persentase Dewan Komisaris dan Kompensasi Dewan Komisaris Independen serta Direksi berpengaruh Negatif terhadap Manajemen Pajak. Sementara penelitian Sulistya (2017) memberikan dukungan pada hubungan dewan komisaris independen dengan manajemen pajak. Berdasarkan latar belakang maka tujuan dari penelitian adalah: untuk menguji ulang inkonsistensi penelitian sebelumnya untuk memberikan bukti empiris terbaru mengenai pengaruh dewan Komisaris, presentasi komisaris independen dan Kompensasi Dewan komisaris serta Direksi terhadap Manajemen Pajak.

TINJAUAN TEORITIS

Manajemen Pajak

Lestari (2016) memberikan penjelasan bahwa memaksimalkan penerimaan pajak bagi pemerintah melalui perubahan system perpajakan menjadi kunci keberhasilan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bagi Pemerintah. Sistem perpajakan Indonesia sekarang ini masih menggunakan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* adalah sistem perpajakan yang mengharuskan wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan beban pajak yang di hitung oleh wajib pajak sendiri. Tujuan dari sistem *Self asesment* adalah “untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, karena wajib pajak bertanggung jawab atas pajak yang tertanggung, wajib pajak juga diharapkan akan lebih mamahami serta mengerti mengenai kewajiban pajaknya karena dibuat dan dihitung sendiri”.

Pengaruh Jumlah Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang fungsinya untuk mengendalikan manajemen perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Sehingga dengan jumlah dewan komisaris yang banyak maka efektivitas fungsi pengawasan berjalan dengan sangat baik. Untuk perusahaan besar dan kompleks, pekerjaan akan maksimal jika jumlah komisaris bertambah; hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan maka akan semakin banyak pula penasihat yang dibutuhkan (Manurung. 2016). Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Minnick, Noga (2010), dan Damanik (2019) menemukan adanya pengaruh positif *corporate governance* terhadap pengelolaan pajak, dimana dewan komisaris dapat melambangkan *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti Bernad (2011) juga mendukung pernyataan ini bahwa jumlah komisaris yang berkontribusi terhadap pengelolaan pajak perusahaan dihitung dengan menggunakan GAAP ETR. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Meilinda (2013) menemukan adanya pengaruh positif jumlah komisaris terhadap pengelolaan pajak.

Dewan direksi merupakan komponen utama dari tata kelola perusahaan, yang terdiri dari beberapa anggota untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan dalam perusahaan. Ada argument yang menyatakan bahwa jumlah dewan direksi akan memberikan bentuk manajemen yang baik bagi perusahaan. Jika manajemen perusahaan baik maka akan berpengaruh pada manajemen perusahaan yang baik (Yunuati & Nuraina, 2017). Perusahaan yang dapat mengelolanya dengan baik berarti perusahaan tersebut berusaha untuk menerapkan efisiensi pajak. Efisiensi pajak merupakan salah satu alternatif/solusi manajemen untuk mengurangi beban pajak sehingga pendapatan/keuntungan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian, (Lestari & Surya, 2015) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, yaitu dengan adanya dewan komisaris, tentunya akan menciptakan kinerja yang baik bagi perusahaan, yang dapat dilihat pada rumusan strategi untuk menentukan pengelolaan pajak yang baik dan efektif bagi perusahaan.

H1: Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

Pengaruh Persentase Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Sesuai Kep-29/PM/2004, suatu perseroan yang sahamnya dimiliki oleh publik dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perseroan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya sebanding dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham nonpengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah komisaris (Putri 2018). Ada aturan di Bursa Efek Indonesia bahwa bagi perusahaan yang sahamnya telah tercatat di bursa efek, perusahaan tersebut harus memiliki 30% komisaris independen agar pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa. Semakin tinggi persentase komisaris independen, semakin banyak perusahaan memiliki dewan komisaris independen. Oleh karena itu, independensi juga akan semakin tinggi karena banyak yang tidak terkait langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan beban pajak akan semakin besar.

Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan dan bertanggung jawab atas kepentingan pemegang saham sehingga komisaris independen akan memperjuangkan kepatuhan pajak perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen maka semakin besar pengawasannya sehingga manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak (Fitria, 2019). Dengan komposisi sebagian besar komisaris independen dalam fungsi pengawasan, manajemen dapat mencegah praktik kecurangan dalam pengelolaan pajak. Menurut (Lestari & Surya 2015), kemampuan dan pemahaman komisaris independen di sektor emiten akan berpengaruh signifikan terhadap persetujuan dan keputusan yang diambil. Mengikuti tanggung jawab hukum emiten kepada pemegang sahamnya, komisaris independen tidak boleh terburu-buru menyetujui transaksi tersebut. -transaksi atau kegiatan emiten yang secara material mengandung informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Pengawasan pada pengungkapan informasi oleh komisaris independen akan meningkatkan kualitas dan luasnya keterbukaan informasi oleh manajemen perusahaan; bahkan proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap pengungkapan wajib setelah IFRS (Izzaty 2018). Secara langsung, keberadaan komisaris independen menjadi penting karena dalam praktiknya sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dengan adanya komisaris independen, semua pihak yang berkepentingan akan mendapatkan manfaat yang sangat besar yang akan membentuk situasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan dan meningkatkan kapabilitasnya sehingga kinerjanya memadai dan tentunya mendukung pengelolaan perpajakan. Besarnya dewan komisaris independen menggambarkan bahwa kenaikan dewan komisaris independen akan menyebabkan kinerja perusahaan menjadi lebih efektif sehingga perusahaan akan melakukan hal-hal yang dianggap perlu guna mencapai efektivitas dalam kegiatan perusahaan, termasuk penetapan kebijakan terkait tarif pajak (Sulistya, 2017).

Merslythalia dan Lasmana (2016) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan besar atau kecilnya proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan tidak menjamin komisaris independen dapat terhindar dari tindakan penghindaran pajak atau pengelolaan pajak. Lagi pula, dewan komisaris independen tidak efektif mencegah tindakan penghindaran pajak. ketentuan yang ditetapkan, sedangkan pemegang saham mayoritas tetap memegang peranan vital agar kinerja dewan komisaris independen tidak meningkat.

H2: Presentasi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Manajemen Pajak

Kompensasi adalah bentuk balas jasa eksekutif atas pelaksanaan tugas yang diberikan kepada individu dalam organisasi. Kompensasi merupakan hak yang harus diperoleh individu karena telah secara sukarela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk menjalankan amanah organisasi (Manurung 2016). Tujuan kompensasi adalah untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer aset. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan insentif opsi saham atau memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi berupa uang. Kompensasi akan memotivasi kinerja manajemen dalam meminimalkan tarif pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Fahreza juga menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara kompensasi manajemen dengan manajemen pajak perusahaan yang diukur dengan box tax gap. Semakin besar kompensasi manajemen yang diberikan oleh perusahaan maka akan semakin memacu manajemen untuk melakukan manajemen pajak untuk memperoleh penghematan beban pajak yang maksimal (Lestari, 2016).

Perusahaan perlu menyelaraskan tujuan perusahaan dan pemilik sebagai tujuan awal adanya kompensasi. Dengan demikian, motivasi pengelola dan pengawas perusahaan untuk mewujudkan manajemen pajak yang baik sehingga tercipta efisiensi pembayaran pajak oleh manajer yang akan berdampak kepada peningkatan nilai perusahaan serta bisa memberikan keuntungan kepada pemegang saham, sebab berhubungan positif dengan peningkatan pengembalian kepada mereka (Ganang, 2017). Sejalan dengan itu, Sunasih (2018) menemukan bahwa tingginya kompensasi yang diterima oleh eksekutif tidak sepenuhnya berperan menjembatani perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer.

H3: Kompensasi dewan komisaris dan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi.

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Populasi (obyek) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018.

Teknik Pengambilan Sampel

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Perusahaan yang digunakan adalah Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.

Teknik Pengumpulan Data dan Operasionalisasi

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode studi pustaka dan mengkaji data sekunder, berupa laporan keuangan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. Manajemen pajak merupakan usaha menyeluruh yang dilakukan oleh *Tax Manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis sehingga memberi kontribusi bagi perusahaan. Pengukuran manajemen pajak dalam penelitian ini menggunakan model tarif pajak efektif atau yang lebih dikenal dengan *Effectife Tax Rate* (ETR), berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung *Effectife Tax Rate* (ETR):

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Ukuran Dewan Komisaris menunjukkan banyaknya personel yang menjadi Dewan Komisaris. Banyaknya jumlah Dewan Komisaris akan berpengaruh dalam pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pula pada kinerja perusahaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Jumlah Dewan Komisaris (BOARD):

$$\text{BOARD} = \sum \text{Seluruh Anggota Dalam Dewan Komisaris}$$

Dewan Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Prabowo 2014). Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Komisaris independen (INDEP) adalah:

$$\text{INDEP} = \frac{\text{Jml. Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100 \%$$

Menurut penelitian, (Rohim 2015) kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi diukur dengan menggunakan perbandingan jumlah kompensasi yang diterima dewan komisaris dan dewan direksi selama setahun dengan jumlah penjualan perusahaan. Berikut ini rumus yang digunakan untuk menghitung Kompensasi yang diterima dewan komisaris dan dewan direksi (COMP) adalah:

$$\text{COMP} = \frac{\text{Jumlah kompensasi per tahun}}{\text{Jumlah penjualan per tahun}}$$

Model Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan model regresi sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1\text{BOARD} + \beta_2\text{INDEP} + \beta_3\text{COMP} + \epsilon$$

Dimana :

ETR = Manajemen Pajak

α = Konstanta

BOARD	= Jumlah Dewan Komisaris
INDEP	= Persentase Komisaris Independen

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dengan melihat data yang ada di laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Berikut ini adalah perincian perolehan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan PT Sat Nusantara Persada Tbk (PTSAN), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), PT Yanaprima Hastapersada (YPAS), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO), PT KMI Wire and Cable (KBLI), PT Sierad Produce Tbk (SIPD), PT Semen Indonesia (Persero), Tbk (SMGR), PT Star Petrochem Tbk (STAR).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dengan melihat data yang ada di laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Berikut ini adalah perincian perolehan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan PT Sat Nusantara Persada Tbk (PTSAN), PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP), PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), PT Yanaprima Hastapersada (YPAS), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO), PT KMI Wire and Cable (KBLI), PT Sierad Produce Tbk (SIPD), PT Semen Indonesia (Persero), Tbk (SMGR), PT Star Petrochem Tbk (STAR).

Tabel 1.

Deskriptif Statistik Data Penelitian

	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev.
BOARD	3,96	7,00	2,00	1,64
INDEP	0,39	0,67	0,17	0,09
COMP	0,15	3,54	0,01	0,56
ETR	0,34	0,95	0,01	0,26
Valid N (listwise)				

Sumber : olahan data SPSS

Nilai Jumlah Dewan Komisaris (**BOARD**) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 2,00 dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 7,00 yaitu dengan nilai rata-rata sebesar 3,96 dan standar deviasi sebesar 1,64. Nilai Presentase Komisaris Independen (**INDEP**) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,17 dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 0,67 dengan nilai rata-rata sebesar 0,39 dan standar deviasi sebesar 0,09. Nilai Kompensasi Dewan Komisaris serta direksi (**COMP**) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 3,54 dengan nilai rata-rata sebesar 0,15 dan standar deviasi sebesar 0,56. Nilai Manajemen Pajak (**ETR**) memiliki nilai terendah atau nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai tertinggi atau nilai maximum sebesar 0,95 dengan nilai rata-rata sebesar 0,34 dan standar deviasi sebesar 0,26.

Analisis Regresi Linear Berganda.

Table 2

Regression Analysis

	B	Std.dev	t	Sg.
(Constant)	0.3	0.189	1,59	-.119
BOARD (X ₁)	-0.053	1.64	-2.46	0.018
INDEF (X ₂)	0.6	0.09	0.202	0.0147
COMP (X ₃)	-0.037	0.056	-0.08	0.0562
R	,405			
Adj. R Square	,110			
F-Statistics	3.013			

Sumber : olahan data SPSS

Berdasarkan hasil table 2 *Regression Analysis* di atas dapat diketahui f-hitung > f-tabel yaitu $3,013 > 2,80$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variable Independen yaitu ; BOARD, INDEF dan COMP mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen *Effective tax rate* (ETR) pada perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Nilai *R Square* sebesar 0,110 atau 11.0 %, artinya variabel *Effective Tax Rate* (ETR) dapat dijelaskan oleh variabel *BOARD*, *INDEP*, dan *COMP* sebesar 11.0%. Sedangkan sisanya sebesar 89.0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Persamaan regresi berganda ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel Dewan Komisaris (BOARD), Komisaris Independen (INDEP) dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi (COMP) terhadap Manajemen Pajak (ETR). Hasil analisis regresi linier berganda disajikan pada tabel 1.1 *Regression Analysis* Berdasarkan hasil table 1.1 *Regression Analysis* di bawah menunjukkan bahwa regresi linear berganda menggunakan uji persamaan sebagai berikut:

$$ETR = 0.300 - 0.53BORD + 0.600INDE P - 0.037COMP + \epsilon$$

Pembahasan

Dari Tabel 2 *Regression Analysis* dapat diketahui bahwa nilai sig dari variabel jumlah Dewan Komisaris lebih kecil dari standar error yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5% (0,05), yaitu $0.018 < 0.05$, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen Pajak. Peneliti menganalisa bahwa data tersebut menyatakan semakin banyak Dewan komisaris yang melakukan pengawasan serta melakukan konsultasi kepada manajemen perusahaan maka semakin efisien jumlah pajak yang akan dibebankan oleh perusahaan atau dengan kata lain manajemen akan melakukan pekerjaan yang obyektif dan efektif serta efisiensi karena semakin banyaknya pengawasan dan konsultasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Hasil Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian, (Diana Lestari, R.Adri Satriawan Surya 2015), bahwa dewan komisaris mempengaruhi manajemen pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa penerapan *Corporate governance* yang baik yaitu adanya dewan komisaris tentu akan menciptakan

kinerja yang baik bagi perusahaan, yang mana akan dapat dilihat dalam perumusan srategik untuk menentukan manajemen pajak yang baik dan efektif bagi perusahaan.

Sedangkan menurut peneliti, (Zulva Yunuati, Elva Nuraina 2017), mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dibuktikan bahwa dewan direksi berpengaruh secara positif terhadap manajemen pajak dimana setiap perusahaan memiliki anggota dewan direksi yang berbeda-beda jumlahnya, tergantung dari besar kecilnya perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah dewan direksi mengindikasikan pembagian tugas dan wewenang semakin baik sehingga pengelolaan perusahaan semakin baik, salah satu bentuk pengelolaan adalah penerapan efisiensi pajak atau manajemen pajak dengan baik sesuai aturan perpajakan.

Perusahaan dengan anggota dewan direksi yang besar dan saling kerjasama mampu mengendalikan pengaturan pajak dengan benar. Keberadaan jumlah anggota dewan direksi sangat berpengaruh dalam menjalankan pengelolaan perusahaan dan menerapkan efisiensi pajak dalam perusahaan. Dari Tabel 1.1 *Regression Analysis* dapat diketahui bahwa nilai sig dari variable Presentasi Komisaris Independen lebih besar dari standar error yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5% (0,05), yaitu $0.147 > 0.05$, artinya secara parsial Presentasi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Menurut pandangan peneliti bahwa jabatan komisaris Independen di perusahaan Indonesia masih kurang memperhatikan kompetensi dan integritas, namun cenderung sebagai penghormatan atau penghargaan saja sehingga wawasan dan pengetahuan serta pengalaman sebagai Komisaris yang independen kurang mampu membaca *core* bisnis perusahaan tersebut sehingga menyebabkan pengawasan yang dilakukan terhadap aktifitas perusahaan kurang maksimal.

Sejalan dengan hasil penelitian, (Sholehudin Adi Nugroho 2017) yang menyatakan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas masih memegang kendali penting sehingga kerja dewan komisaris tidak meningkat dan juga diperkuat oleh peneliti, (Handayaini 2017) bahwa terdapat beberapa hal yang diduga menjadi alasan mengapa besarnya proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak. Karena, tidak semua anggota Dewan Komisaris Independen dapat menunjukkan independensinya sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik dan berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen. Kemudian kemampuan Komisaris Independen dalam rangka memantau proses keterbukaan dan penyediaan informasi akan terbatas apabila pihak-pihak terafiliasi yang ada di perusahaan lebih mendominasi dan dapat mengendalikan Dewan Komisaris secara keseluruhan. Serta Dewan Komisaris Independen kurang tanggap dalam memperhatikan ada atau tidaknya tindakan *tax avoidance* atau pajak agresif dalam perusahaan sehingga melalaikan kewajibannya kepada negara.

Dari Tabel 2 *Regression Analysis* dapat diketahui bahwa nilai sig dari variable Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi lebih besar dari standar error yang ditetapkan dalam penelitian ini sebesar 5% (0,05), yaitu $0.562 > 0.05$, artinya secara parsial Kompensasi Dewan komisaris serta Direksi tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Menurut pendapat peneltian bahwa Pada perusahaan yang mengelola *Corporate governance* dengan baik, penyalarsan antara kepentingan pemegang saham dan eksekutif melalui peningkatan kompensasi tidak berlaku. Sehingga peningkatan terhadap kompensasi direksi tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pembayaran pajak. Dengan demikian pemberian kompensasi yang tinggi terhadap direksi bukan merupakan suatu cara yang efektif dalam meningkatkan usaha

manajemen pajak dengan memperkecil pembayaran pajak. Hal ini disebabkan adanya mekanisme lain yang lebih tepat diterapkan untuk mengelola manajemen pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan, (Prayogo 2015) yang menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan alasan bahwa di Indonesia, pemberian kompensasi kepada direksi dan komisaris bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan ikut meningkatnya beban pajak perusahaan. Namun demikian, peningkatan kinerja ini hanya sebatas peningkatan laba dan efisiensi biaya, namun tidak pada efisiensi biaya pajak dan dalam hal ini juga menunjukkan sistem bonus di Indonesia kurang memotivasi para manjer dalam pengambilan keputusan pajak perusahaan yang agresif. Dan juga sejalan dengan penelitian, (Rohim 2015), hasil pengujian variabel Kompensasi komisaris serta direksi terhadap Manajemen Pajak (ETR) menunjukkan bahwa variabel tersebut mempunyai nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu 0.226, maka hal ini berarti bahwa Kompensasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak (ETR).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada penelitian ini bahwa secara parsial, variabel Dewan Komisaris (BOARD) berpengaruh positif terhadap Manajemen Pajak, dan Komisaris Independen (INDEP) dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi (COMP) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Pajak. Sedangkan secara simultan variabel Dewan Komisaris (BOARD) Komisaris Independen (INDEP) dan Kompensasi Dewan Komisaris serta Direksi (COMP) berpengaruh terhadap Manajemen Pajak (ETR).

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu untuk menggunakan perusahaan yang lebih banyak tidak hanya perusahaan manufaktur saja untuk memberikan hasil yang dapat menjelaskan variabel yang digunakan dan untuk para organ perusahaan serta diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan untuk manajemen pajak perusahaan, yang diterapkan sesuai karakteristik perusahaan berupa jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Selain itu, dapat dijadikan masukan mengenai pentingnya manajemen pajak dengan upaya meminimalkan pajak terhutang serta menunjukkan keuntungan yang didapat apabila perusahaan melakukan manajemen pajak. Komisaris Independen harus memperhatikan kewajiban dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Semakin banyaknya kepentingan luar membuat komisaris independen tidak efektif atau tidak objektif yang menjadikan fungsi pengawasan terhadap kinerja dewan pengurus tidak berjalan dengan baik dan kurang kompeten.

REFERENSI

- Aprina, D. N., & Khairunnisa, K. (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba (studi Kasus Pada Perusahaan Perdagangan, Jasa, Dan Investasi Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014). *eProceedings of Management*, 2(3).
- Aprilina, V. (2019). Dapatkah CSR Disclosure dan Corporate Governance Menangkap Manajemen Laba, dan Manajemen Pajak?. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 4(1), 68-81.
- Basuki, B. (2019). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, CAPITAL INTENSITY DAN CORPORATE RISK TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016). *JMB: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 7(1).

- Damanik, D. N. H., & Mu'id, D. (2019). CORPORATE GOVERNANCE, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN MANAJEMEN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Indeks LQ45 Periode 2014-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).
- Darmawati, D., & Delfina, C. (2018, October). Pengaruh komisaris independen dan kompensasi eksekutif terhadap kepatuhan wajib pajak. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN (pp. 927-932).
- Djuniar, L. (2019). PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *Akuntanika*, 5(2), 67-77.
- Fathoni, A. F., & Wijaya, E. Y. (2014). The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism, Financial Distress On Earning Management Behavior: Empirical Study In Property And Infrastructure Industry In Indonesian Stock Exchanges. *Jurnal Ekonomi*, 22(01), 116-131.
- Fitria, G. N., & Handayani, R. (2019). Tax avoidance: studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di indonesia. *Monex: Journal of Accounting Research-Politeknik Harapan Bersama Tegal*, 8(1), 251-267.
- Ganang, W. D., & Ghozali, I. (2017). *Hubungan Penerapan Corporate Governance Dan Social Corporate Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2015)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Khairunnisa, R., Nasir, A., & Ilham, E. (2016). *Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Izzaty, K. N., & Kurniawan, P. C. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan, Struktur Kepemilikan Dan Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi Pasca Konvergensi IFRS. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM*, 8(2), 215-228.
- Lestari, H. M., & Fidiana, F. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(12).
- Manurung, T. K., & Krisnawati, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016). *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, (1), 601-608.
- Merslythalia, D. R. (2016). *Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Oliviana, A., & Mu'id, D. (2019). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).
- Prabowo, D. A. (2014). Pengaruh Komisaris Independen, Independensi Komite Audit, Ukuran Dan Jumlah Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012). *Accounting Analysis Journal*, 3(1).
- Prasasti, B., & Ardianto, J. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Ultimaccounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 3(1), 46-65.
- Sari, D. A. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Nuswantoro University Journal of Accounting*, 1-17.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *JURNAL AKUNTANSI*, 9(1), 90-103.
- Sari, T. A. M. (2019). PENGARUH KOMISARIS ASING DAN DIREKSI ASING TERHADAP STRUKTUR MODAL. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(4), 484-504.
- Sunarsih, U., & Handayani, P. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 163-185.

- Susilowati, H. (2011). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan.
- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini, N. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2016).
- Syoraya, S., & Januarti, I. (2014). Pengaruh Kompensasi Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Risiko Bisnis Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting*, 196-204.
- Wahyuni, E., Sulistyono, S., & Dianawati, E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode 2012-2015). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5(2).
- Yuniati, Z., Nuraina, E., & Astuti, E. (2017, October). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di BEI 2011-2015. In *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi* (Vol. 5, No. 1).
- Yustiningarti, N. D., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Asimetri Informasi, Mekanisme Corporate Governance Dan Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(9).

Competing interests

The authors declare that they have no competing interests.

Funding.

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

About the Authors

Dr. Wastam Wahyu Hidayat is lecturer in Finance Management at the Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Jakarta Raya. He holds a doctorate from Universitas Pancasila Jakarta. He has researched various issues in Finance Management topics, especially those related to Capital Structure and Value of the Firm and has also been a speaker at various seminars, on Finance Management issues.

Dr. Soehardi P.hD is lecturer in Management at the Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Jakarta Raya. He holds a doctorate from University of southeastern philippines. He has researched various issues in Management topics, especially those related Marketing and has also been a speaker at various seminars, on Management issues.

Cahyadi Husadha, S.E., M.M. is a lecturer at the Faculty of Economics and Business, Bhayangkara University, Jakarta Raya, in the field of finance management.